

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Landasan Teori

##### 2.1.1. Bursa Efek Indonesia

Bursa Efek adalah badan hukum yang mempunyai tugas sebagai sarana dalam melaksanakan dan mengatur jalannya kegiatan perdagangan Efek yang ada di Pasar Modal. Dari segi perekonomian mikro bagi para anggota bursa (emiten), selain itu berfungsi untuk mendapatkan modal yang dapat digunakan untuk melakukan ekspansi usaha. Sementara dari segi ekonomi makro, Bursa Efek mempunyai peran penting untuk menggerakkan perekonomian negara. Jika dalam perdagangan Efek di pasar modal yang dilakukan di Bursa Efek menunjukkan hasil yang positif, maka gambaran tersebut dapat berakibat untuk tercapainya kinerja yang positif dalam perekonomian suatu negara, demikian pula jika terjadi hal yang sebaliknya. Bursa Efek adalah suatu pasar konvensional yang mempertemukan antara penjual dan pembeli. Dapat didefinisikan bahwa pada dasarnya kegiatan yang dilakukan oleh Bursa Efek adalah menyelenggarakan dan menyediakan sarana atau sistem perdagangan bagi para anggotanya (Azmi & Kharisma, 2020:235).

Bursa efek adalah pihak yang mengatur dan menyediakan mekanisme atau sarana untuk mengumpulkan penawaran dari pihak-pihak yang hendak memperdagangkan efek untuk membeli dan menjual efek. Bursa Efek didirikan untuk menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana perdagangan Efek. Dengan tersedianya sistem dan atau sarana yang baik, para Anggota Bursa Efek dapat melakukan penawaran jual dan beli Efek secara teratur, wajar, dan efisien (ojk.go.id dalam Mahyuni, 2022:425).

##### 2.1.2. *Agency Theory* (Teori Keagenan)

Teori keagenan (*Teori agency*) adalah hubungan atau kontrak antara pemilik (*principal*) dan manajer (*agent*). Masalah yang mendasari teori keagenan adalah konflik kepentingan antara pemegang saham/ investor dan manajemen, dimana pemegang saham berperan sebagai pemilik, dengan harapan investor akan memperoleh keuntungan dan manajemen diharapkan mampu bekerjasama untuk meningkatkan kinerja perusahaan.

Di Hubungan ini prinsipnya harus memiliki kepercayaan yang kuat, dimana agent melaporkan segala informasi perkembangan perusahaan yang dimiliki oleh principal kontraktual antara dua atau lebih (pihak) diciptakan oleh teori keagenan (*agency theory*), yang dikembangkan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Perspektif teori keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami isu *Corporate Government* dan manajemen laba, karena Terdapatnya beberapa perbedaan kepentingan antara manajemen dan investor yang timbul sebagai akibat keinginan manajemen (agen) untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan kepentingannya yang dapat mengorbankan kepentingan pemegang saham (prinsipal), yang disebut konflik Keagenan selanjutnya maka dibutuhkan adanya *good corporate government* dalam sebuah perusahaan. Menurut *forum of Corporate Governance in Indonesia*, *corporate governance* merupakan seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus atau pengelola, pihak kreditor, perusahaan, karyawan, pemerintah dan pihak-pihak yang memegang saham.

### **2.1.3 Kinerja Keuangan**

Tujuan utama dari sebuah perusahaan yaitu untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Apabila sebuah perusahaan dapat mencapai tujuan tersebut maka dinilai memiliki kinerja yang baik terutama kinerja keuangannya. Menurut Risnanditya & Laksito (2018:1-2) kinerja keuangan merupakan faktor yang menunjukkan efektifitas dan efisiensi dalam suatu organisasi agar dapat mencapai tujuan. Menurut website sarjanaekonomi.co.id tujuan kinerja keuangan dibagi menjadi 4 tujuan yaitu :

1. Mengetahui tingkat likuiditas, likuiditas memberikan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera diselesaikan ketika waktunya ditagih.
2. Mengetahui tingkat solvabilitas yaitu memberitahukan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi, baik keuangan jangka pendek ataupun jangka panjang.
3. Mengetahui Tingkat rentabilitasnya itu memberitahukan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba selama periode tertentu.
4. Mengetahui Tingkat stabilitas dimana kemampuan perusahaan untuk melaksanakan usaha dengan stabil yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar hutangnya serta membayar beban bunga atas hutang pada waktunya.

## 2.1.4 Pengukuran Kinerja Keuangan

Pengukuran kinerja keuangan merupakan usaha formal untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba dan posisi kas tertentu. Dengan pengukuran kinerja keuangan ini dapat dilihat prospek pertumbuhan dan perkembangan keuangan ini dapat dilihat prospek pertumbuhan dan perkembangan keuangan perusahaan dari mengandalkan sumber daya yang di miliknya. Secara teknik analisis kinerja keuangan dapat membedakan menjadi sembilan macam (Reysa *et al.*, 2022 :364-374):

- a. Analisis perbandingan laporan keuangan, merupakan teknik analisis dengan cara membandingkan laporan keuangan dari dua periode atau lebih untuk menunjukkan perubahan dalam jumlah maupun dalam persentase.
- b. Analisis tren, merupakan teknik analisis yang di gunakan untuk mengetahui tendensi keadaan keuangan dan kinerja keuangan dan kinerja perusahaan, apakah menunjukkan kenaikan atau penurunan.
- c. Analisis persentase per komponen (*common size*), merupakan teknik analisis yang di gunakan untuk mengetahui persentase masing-masing komponen aset terhadap total aset; persentase masing-masing komponen utang dan modal terhadap passiva (*total asset*) persentase masing-masing komponen laba rugi terhadap penjualan bersih.
- d. Analisis sumber dan penggunaan modal kerja, merupakan teknik analisis yang di gunakan untuk mengetahui besarnya sumber dan penggunaan modal kerja selama dua periode waktu yang di bandingkan.
- e. Analisis sumber dan penggunaan kas, merupakan teknik analisis yang di gunakan untuk mengetahui kondisi kas dan perubahan kas pada suatu periode waktu tertentu.
- f. Analisis rasio keuangan, merupakan teknik analisis yang di gunakan untuk mengetahui hubungan di antara pos tertentu dalam neraca maupun laporan laba rugi.
- g. Analisis perubahan laba kotor, merupakan teknik analisis yang di gunakan untuk mengetahui posisi laba kotor dari satu periode ke periode berikutnya, serta sebab-sebab terjadinya perubahan laba kotor tersebut.
- h. Analisis titik impas, merupakan teknik analisis yang di gunakan untuk mengetahui tingkat penjualan yang harus di capai agar perusahaan tidak mengalami kerugian.
- i. Analisis kredit, merupakan teknik analisis yang di gunakan untuk menilai layak tidaknya suatu permohonan kredit debitur kepada kreditur, seperti bank.

## 2.2 Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah sebuah badan pengawas dalam struktur tata kelola perusahaan yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan manajemen serta memberi nasihat kepada direksi. Dewan Komisaris bertanggung jawab memastikan bahwa perusahaan dikelola sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mereka berperan sebagai pengendali kualitas dalam proses pengambilan keputusan di perusahaan, yang mencakup pengawasan terhadap kinerja direksi dan peninjauan terhadap kebijakan strategis perusahaan(Lumbanraja, 2021).

Dewan Komisaris tidak terlibat secara langsung dalam operasional sehari-hari perusahaan, tetapi mereka memiliki wewenang untuk meminta laporan dan informasi dari direksi untuk memastikan bahwa manajemen berjalan sesuai dengan rencana dan standar yang telah ditetapkan. Dewan Komisaris juga berfungsi sebagai badan yang memantau implementasi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) yang mencakup transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kesetaraan(Lumbanraja, 2021).

Peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007) di Indonesia. Menurut undang-undang ini, Dewan Komisaris wajib menjalankan tugasnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan dengan kehati-hatian yang maksimal. Selain itu, Dewan Komisaris juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja direksi, menyetujui rencana bisnis jangka panjang perusahaan, serta memberikan persetujuan terhadap kebijakan penting seperti pembagian dividen, akuisisi, atau penjualan aset perusahaan.

Dalam konteks internasional, peran Dewan Komisaris atau yang setara, seperti *Board of Directors* di negara-negara dengan sistem tata kelola Anglo-Saxon, semakin diperhatikan. Menurut berbagai penelitian dan laporan pasca 2020, Dewan Komisaris yang berfungsi efektif dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan memberikan perlindungan yang lebih baik kepada pemegang saham serta pemangku kepentingan lainnya. Sebagai contoh, laporan dari McKinsey pada tahun 2021 menekankan pentingnya Dewan Komisaris yang mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis yang cepat, serta menyoroti peran mereka dalam mendorong inovasi dan keberlanjutan dalam jangka panjang(Lumbanraja, 2021).

### **2.2.1 Indikator Dewan Komisaris**

Indikator Dewan Komisaris adalah berbagai faktor atau metrik yang digunakan untuk menilai efektivitas dan kinerja Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas dan penasihat direksi. Salah satu indikator utama adalah komposisi Dewan Komisaris, yang mencakup jumlah anggota, keahlian, dan keberagaman. Dewan Komisaris yang terdiri dari anggota dengan berbagai latar belakang profesional, keahlian, dan pengalaman industri dapat memberikan perspektif yang lebih luas dan mendalam dalam pengambilan keputusan strategis. Selain itu, keberadaan komisaris independen yang tidak terlibat dalam manajemen operasional perusahaan dianggap sebagai indikator penting, karena mereka dapat memberikan penilaian yang objektif dan mengurangi potensi konflik kepentingan (Nguyen & Khadijah.2022)

### **2.3 Dewan Direksi**

Dewan Direksi adalah badan eksekutif dalam struktur perusahaan yang bertanggung jawab atas pengelolaan operasional dan pengambilan keputusan strategis untuk mencapai tujuan perusahaan. Dewan Direksi memainkan peran sentral dalam merumuskan visi, misi, dan strategi jangka panjang perusahaan serta mengawasi implementasi rencana tersebut dalam kegiatan sehari-hari. Berikut adalah definisi Dewan Direksi menurut para ahli:

Larcker&Tayan (2020:107)mendefinisikan Dewan Direksi sebagai "sekelompok individu yang ditunjuk oleh pemegang saham untuk menjalankan tanggung jawab pengawasan dan pengelolaan atas nama mereka. Dewan Direksi bertanggung jawab untuk menyetujui strategi perusahaan, mengawasi kinerja manajemen, dan memastikan bahwa perusahaan dikelola dengan cara yang konsisten dengan kepentingan pemegang saham serta peraturan yang berlaku."

Monks&Minow (2020:251), menggambarkan Dewan Direksi sebagai "entitas yang memiliki wewenang akhir dalam pengambilan keputusan di perusahaan. Direksi bertugas menetapkan arah strategis perusahaan, memastikan bahwa manajemen eksekutif menjalankan operasi dengan efektif dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, serta melindungi kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya."

Dewan Direksi memegang peran penting dalam keberlanjutan dan kesuksesan perusahaan. Mereka bertugas untuk merumuskan dan menyetujui rencana strategis perusahaan, yang mencakup perencanaan jangka panjang, analisis risiko, dan pengambilan keputusan yang berdampak pada seluruh operasi perusahaan. Dewan Direksi bertanggung jawab untuk

menetapkan tujuan yang jelas dan memastikan bahwa sumber daya yang tersedia digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan tersebut. Mereka juga harus mempertimbangkan dampak dari keputusan strategis terhadap berbagai pemangku kepentingan, termasuk karyawan, pelanggan, dan masyarakat luas. Selain peran strategis, Dewan Direksi juga bertindak sebagai pengawas atas manajemen eksekutif, yang dipimpin oleh CEO. Mereka mengevaluasi kinerja manajemen, memberikan arahan, dan melakukan intervensi jika diperlukan untuk memastikan bahwa perusahaan tetap berada di jalur yang tepat. Dewan Direksi harus memastikan bahwa manajemen bertindak sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, termasuk dalam hal kepatuhan terhadap peraturan hukum dan etika bisnis. Dalam hal ini, Dewan Direksi berfungsi sebagai penjaga terakhir yang melindungi perusahaan dari tindakan yang berisiko atau merugikan.

Aspek lain dari peran Dewan Direksi adalah memastikan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Mereka harus mempromosikan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam semua aspek operasi perusahaan. Dewan Direksi bertanggung jawab untuk membentuk dan mengawasi kebijakan-kebijakan yang mendukung prinsip-prinsip tata kelola yang baik, serta memantau implementasi dari kebijakan tersebut di seluruh tingkat organisasi. Hal ini mencakup pengawasan terhadap sistem pelaporan keuangan, manajemen risiko, serta kebijakan keberlanjutan perusahaan.

Secara keseluruhan, Dewan Direksi adalah pilar penting dalam struktur tata kelola perusahaan yang berperan dalam mengarahkan dan mengawasi operasi perusahaan untuk mencapai hasil yang optimal bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Definisi yang diberikan oleh para ahli menekankan pentingnya peran strategis, pengawasan, dan tata kelola yang dijalankan oleh Dewan Direksi dalam menciptakan nilai dan menjaga keberlanjutan perusahaan di tengah dinamika pasar yang terus berubah (Intia & Azizah, 2021).

### **2.3.1 Indikator Dewan Direksi**

Indikator Dewan Direksi adalah berbagai faktor atau metrik yang digunakan untuk menilai efektivitas dan kinerja Dewan Direksi dalam menjalankan tugasnya mengelola dan mengarahkan perusahaan. Salah satu indikator utama adalah kompetensi dan pengalaman anggota Dewan Direksi. Dewan yang terdiri dari individu-individu dengan keahlian yang relevan dan pengalaman luas di industri atau bidang terkait dapat memberikan arahan strategis yang lebih baik dan mengambil keputusan yang lebih tepat untuk mencapai tujuan perusahaan.

Kompetensi ini mencakup pemahaman mendalam tentang operasi perusahaan, manajemen risiko, keuangan, serta tren pasar yang dapat mempengaruhi bisnis (Intia& Azizah. 2021).

## **2.4 Komite Audit**

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris atau Dewan Direksi yang bertanggung jawab untuk membantu pengawasan dan penjaminan terhadap integritas laporan keuangan, efektivitas pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap hukum serta regulasi yang berlaku. Berikut adalah definisi Komite Audit menurut para ahli:

Jensen (2020), mendefinisikan Komite Audit sebagai "sebuah komite yang memiliki tanggung jawab khusus untuk mengawasi proses pelaporan keuangan perusahaan, termasuk peninjauan terhadap kebijakan akuntansi, pelaporan internal, serta hubungan dengan auditor eksternal. Komite ini juga berperan penting dalam memastikan bahwa perusahaan memiliki sistem pengendalian internal yang efektif untuk meminimalkan risiko dan mencegah kecurangan."

Rittenberg &Schwieger (2021), menjelaskan Komite Audit sebagai "komite yang berfungsi sebagai penghubung antara Dewan Komisaris, manajemen, dan auditor eksternal. Tugas utamanya adalah untuk menilai dan mengawasi kualitas proses pelaporan keuangan, mengidentifikasi risiko-risiko utama, serta memastikan kepatuhan terhadap kebijakan tata kelola perusahaan dan regulasi yang berlaku."

Komite Audit memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga integritas dan kredibilitas laporan keuangan perusahaan. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan kepada pemegang saham dan publik secara umum adalah benar dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas ini, Komite Audit harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang kebijakan akuntansi dan standar pelaporan keuangan, serta kemampuan untuk menilai apakah informasi yang disajikan dalam laporan keuangan mencerminkan kondisi keuangan perusahaan secara akurat. Selain itu, Komite Audit juga berperan dalam meninjau dan menyetujui keputusan-keputusan signifikan yang berkaitan dengan pelaporan keuangan, termasuk pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi baru. Selain fokus pada pelaporan keuangan, Komite Audit juga bertanggung jawab atas pengawasan terhadap sistem pengendalian internal perusahaan. Pengendalian internal ini mencakup semua kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk melindungi aset perusahaan, memastikan keakuratan catatan akuntansi, dan mencegah serta mendeteksi tindakan penipuan atau kecurangan. Komite Audit harus secara berkala meninjau efektivitas sistem pengendalian

internal dan merekomendasikan perbaikan jika diperlukan. Pengawasan ini penting karena pengendalian internal yang kuat dapat membantu perusahaan mengelola risiko dengan lebih baik dan meningkatkan kepercayaan investor serta pemangku kepentingan lainnya.

Tugas Komite Audit juga mencakup hubungan dengan auditor eksternal. Mereka bertanggung jawab untuk memilih, mengevaluasi, dan jika perlu, mengganti auditor eksternal. Komite Audit harus memastikan bahwa auditor eksternal bekerja secara independen dan memberikan penilaian yang objektif terhadap laporan keuangan perusahaan. Selain itu, mereka harus meninjau laporan audit eksternal dan berdiskusi dengan auditor mengenai temuan audit, serta memastikan bahwa manajemen mengambil tindakan yang tepat untuk menanggapi setiap masalah yang diidentifikasi dalam audit tersebut.

Secara keseluruhan, peran Komite Audit dalam struktur tata kelola perusahaan adalah untuk memberikan pengawasan yang objektif dan independen terhadap proses pelaporan keuangan, pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap regulasi. Definisi dan penjelasan dari para ahli menekankan pentingnya fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Komite Audit dalam menjaga integritas keuangan perusahaan dan memastikan bahwa perusahaan beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

#### **2.4.1 Indikator Komite Audit**

Indikator Komite Audit adalah metrik atau faktor yang digunakan untuk menilai efektivitas dan kinerja Komite Audit dalam menjalankan tugas pengawasan atas laporan keuangan, pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan. Salah satu indikator utama adalah komposisi dan independensi Komite Audit. Komite Audit yang efektif biasanya terdiri dari anggota-anggota yang memiliki pengetahuan dan keahlian yang mendalam di bidang keuangan, akuntansi, dan audit. Selain itu, independensi anggota Komite Audit dari manajemen perusahaan merupakan indikator penting, karena memastikan bahwa mereka dapat melakukan pengawasan tanpa ada konflik kepentingan. Keberadaan anggota independen dalam komite ini sangat penting untuk menjaga objektivitas dan integritas proses pengawasan.

#### **2.5. Kepemilikan Institusional**

Kepemilikan Institusional merujuk pada kepemilikan saham suatu perusahaan yang dipegang oleh institusi-institusi besar seperti dana pensiun, perusahaan asuransi, reksa dana, dan lembaga keuangan lainnya. Institusi ini memiliki pengaruh signifikan terhadap kebijakan

perusahaan karena jumlah saham yang dimiliki. Berikut adalah definisi kepemilikan institusional menurut para ahli:

Aguilera&Crespi(2022), dalam penelitian mereka mendefinisikan kepemilikan institusional sebagai "kepemilikan saham oleh lembaga-lembaga besar yang memiliki kapasitas untuk mengawasi dan mempengaruhi kebijakan manajemen perusahaan, terutama dalam hal tata kelola perusahaan dan kebijakan strategis jangka panjang."

Paine&Lee (2023), menjelaskan kepemilikan institusional sebagai "peran yang dimainkan oleh investor institusional dalam memegang dan mengelola saham perusahaan, yang memungkinkan mereka untuk menjadi agen pengawasan yang efektif terhadap manajemen perusahaan, mempromosikan akuntabilitas, dan berkontribusi pada peningkatan nilai perusahaan melalui tata kelola yang lebih baik."

Kepemilikan institusional memiliki dampak signifikan terhadap tata kelola perusahaan karena institusi-institusi ini sering kali memiliki jumlah saham yang besar, memberi mereka kekuatan untuk mempengaruhi keputusan manajemen. Salah satu peran penting dari kepemilikan institusional adalah kemampuannya untuk menjadi pengawas efektif terhadap kinerja manajemen. Institusi-institusi ini biasanya memiliki sumber daya yang cukup dan keahlian untuk melakukan analisis mendalam terhadap kebijakan perusahaan dan kinerja manajemen. Dengan demikian, mereka dapat mendorong perusahaan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan tata kelola yang baik. Selain itu, kepemilikan institusional juga berfungsi sebagai mekanisme untuk mengurangi potensi konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham lainnya. Karena institusi-institusi ini memiliki kepentingan finansial yang signifikan dalam perusahaan, mereka cenderung lebih proaktif dalam memastikan bahwa manajemen bertindak demi kepentingan terbaik dari semua pemegang saham. Mereka dapat menggunakan hak suara mereka dalam rapat pemegang saham untuk mendukung kebijakan yang meningkatkan nilai pemegang saham dan menentang kebijakan yang tidak sejalan dengan tujuan jangka panjang perusahaan. Namun, kepemilikan institusional juga menghadapi tantangan tertentu. Salah satu tantangan adalah potensi untuk "*passive ownership*," di mana institusi hanya memegang saham tanpa terlibat aktif dalam pengawasan perusahaan. Ini dapat terjadi jika institusi lebih fokus pada portofolio investasi yang luas dan kurang memperhatikan setiap perusahaan secara individual. Selain itu, ada juga kekhawatiran bahwa institusi-institusi besar dapat mendominasi keputusan perusahaan dengan cara yang tidak selalu sesuai dengan kepentingan pemegang saham minoritas atau pemangku kepentingan lainnya.

Dalam konteks global, tren kepemilikan institusional terus berkembang dengan semakin banyaknya dana yang dikelola oleh institusi keuangan besar. Ini menunjukkan peningkatan pengaruh institusi dalam tata kelola perusahaan di berbagai negara. Secara keseluruhan, kepemilikan institusional memainkan peran kunci dalam memperkuat tata kelola perusahaan yang baik, mendorong akuntabilitas, dan meningkatkan nilai pemegang saham, namun tetap memerlukan keseimbangan antara pengawasan aktif dan pengelolaan portofolio yang efektif.

### **2.5.1 Indikator Kepemilikan Institusional**

Indikator untuk mengukur kepemilikan institusional biasanya didasarkan pada proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi-institusi besar seperti dana pensiun, perusahaan asuransi, reksa dana, dan lembaga keuangan lainnya. Salah satu indikator yang sering digunakan adalah persentase kepemilikan institusional, yang dapat dihitung dengan membagi jumlah saham yang dimiliki oleh institusi dengan total saham yang beredar di pasar. Rumus sederhana untuk menghitungnya adalah:

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Jumlah Saham yang Dimiliki Institusi}}{\text{Total Saham Beredar}} \times 100\%$$

Indikator ini memberikan gambaran mengenai sejauh mana perusahaan dipengaruhi oleh investor institusional. Semakin tinggi persentasenya, semakin besar kemungkinan institusi memiliki kekuatan untuk mempengaruhi keputusan manajemen dan arah strategis perusahaan.

Persentase kepemilikan institusional merupakan indikator penting dalam memahami dinamika tata kelola perusahaan. Jika sebuah perusahaan memiliki tingkat kepemilikan institusional yang tinggi, hal ini biasanya dianggap sebagai tanda positif karena institusi-institusi ini cenderung memiliki kapasitas untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap manajemen. Dengan pengalaman dan keahlian mereka, investor institusional dapat menekan manajemen untuk beroperasi secara lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Selain itu, mereka juga bisa berperan dalam menstabilkan harga saham perusahaan, karena mereka cenderung memiliki orientasi investasi jangka panjang.

Namun, indikator kepemilikan institusional juga harus dilihat dalam konteks yang lebih luas. Misalnya, distribusi kepemilikan di antara berbagai jenis institusi (seperti dana pensiun versus hedge fund) dapat memberikan wawasan tambahan tentang strategi dan tekanan yang mungkin dihadapi oleh manajemen. Selain itu, perlu dipertimbangkan bahwa tingkat

kepemilikan institusional yang terlalu tinggi bisa menyebabkan konsentrasi kekuatan yang berlebihan, yang mungkin tidak selalu sejalan dengan kepentingan pemegang saham minoritas atau tujuan jangka panjang perusahaan. Oleh karena itu, analisis kepemilikan institusional harus selalu dilakukan dengan mempertimbangkan konteks spesifik perusahaan dan pasar.

## **2.6. Penelitian Sebelumnya**

Berikut adalah penelitian terdahulu dengan topik "Pengaruh Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit, dan Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Keuangan,".

Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana struktur tata kelola perusahaan, yang meliputi Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit, dan Kepemilikan Institusional, mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Studi ini menggunakan data sekunder dari laporan tahunan perusahaan selama periode 2018-2020. Hasilnya menunjukkan bahwa ukuran Dewan Komisaris dan independensi Komite Audit memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Sebaliknya, kepemilikan institusional yang tinggi cenderung meningkatkan tekanan pada manajemen untuk menghasilkan laba yang berkelanjutan (Amelia & Rizky, 2021).

Penelitian ini berfokus pada sektor perbankan di Asia Tenggara, mengevaluasi pengaruh Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit, dan Kepemilikan Institusional terhadap kinerja keuangan bank. Penelitian ini menggunakan metode panel data dengan sampel bank-bank besar di Indonesia, Malaysia, dan Thailand selama periode 2019-2021. Hasilnya mengindikasikan bahwa keterlibatan aktif Dewan Komisaris dan Dewan Direksi dalam pengambilan keputusan strategis serta pengawasan oleh Komite Audit memiliki korelasi positif dengan profitabilitas bank. Selain itu, kepemilikan institusional yang signifikan juga berkontribusi terhadap stabilitas keuangan (Tran & Khadijah, 2022).

Penelitian ini menganalisis pengaruh Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit, dan Kepemilikan Institusional terhadap kinerja keuangan perusahaan-perusahaan teknologi yang terdaftar di Nasdaq. Menggunakan data dari 2019 hingga 2022, studi ini menemukan bahwa kehadiran Dewan Komisaris yang beragam secara gender dan profesional meningkatkan inovasi dan, pada akhirnya, kinerja keuangan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa peran aktif Komite Audit dalam mengawasi pengendalian internal secara signifikan mengurangi risiko keuangan dan meningkatkan kinerja. Sementara itu, kepemilikan institusional yang besar

terbukti berkontribusi terhadap peningkatan pengawasan dan kebijakan manajemen risiko (Johnson & Parker,2023).

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1	Putri Amelia & Muhammad Rizky (2021)	Pengaruh Struktur Tata Kelola Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan: Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia	Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Kinerja Keuangan	Ukuran Dewan Komisaris dan independensi Komite Audit berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Kepemilikan institusional tinggi meningkatkan tekanan pada manajemen untuk menghasilkan laba berkelanjutan.
2	Nguyen Tran & Siti Khadijah (2022)	Peran Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan di Asia Tenggara	Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Kinerja Keuangan	Keterlibatan aktif Dewan Komisaris dan Dewan Direksi serta pengawasan oleh Komite Audit memiliki korelasi positif dengan profitabilitas bank. Kepemilikan institusional berkontribusi terhadap stabilitas keuangan.
3	Andrew Johnson & Emily Parker (2023)	Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Teknologi di Amerika Serikat	Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Kinerja Keuangan	Kehadiran Dewan Komisaris yang beragam meningkatkan inovasi dan kinerja keuangan. Peran aktif Komite Audit mengurangi risiko keuangan. Kepemilikan institusional berkontribusi pada pengawasan dan kebijakan manajemen risiko.

4	Clara Müller & Pierre Dubois (2021)	Tata Kelola Perusahaan dan Kinerja Keuangan: Studi Empiris pada Perusahaan Energi di Eropa	Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Kinerja Keuangan	Komite Audit yang aktif dan independen meningkatkan transparansi dan akurasi pelaporan keuangan. Dewan direksi dengan keahlian khusus meningkatkan profitabilitas. Kepemilikan institusional memoderasi pengambilan keputusan strategis.
---	-------------------------------------	--	---	--

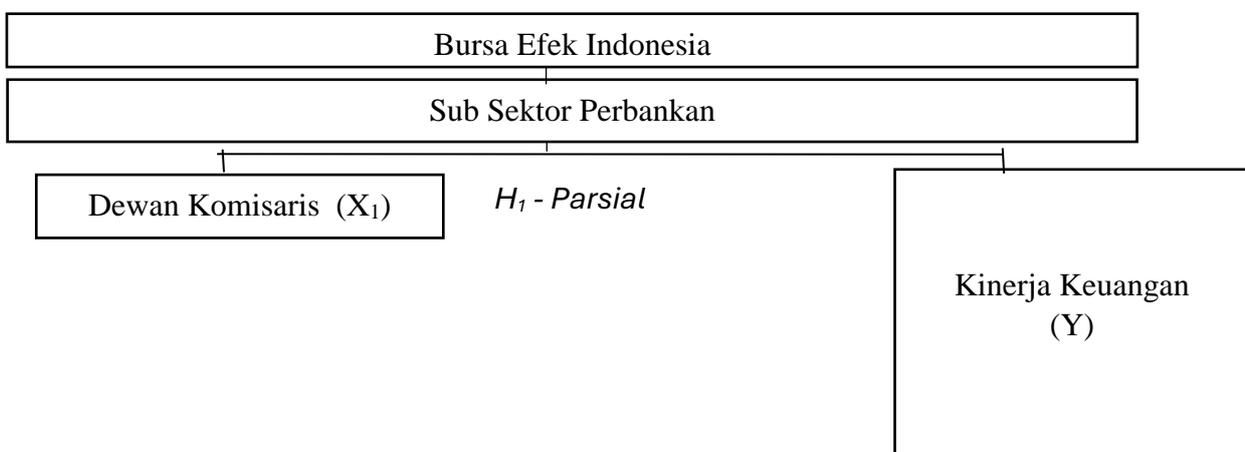
Penelitian ini mengkaji pengaruh Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit, dan Kepemilikan Institusional terhadap kinerja keuangan perusahaan-perusahaan energi di Eropa. Menggunakan data dari 50 perusahaan energi terkemuka di Eropa Barat selama periode 2020-2022, studi ini menunjukkan bahwa keberadaan Komite Audit yang aktif dan independen berperan penting dalam memastikan transparansi dan akurasi pelaporan keuangan, yang berujung pada peningkatan kepercayaan investor dan kinerja keuangan. Studi ini juga menemukan bahwa dewan direksi dengan keahlian khusus dalam sektor energi dapat membuat keputusan yang lebih tepat, yang pada akhirnya meningkatkan profitabilitas perusahaan. Kepemilikan institusional ditemukan memiliki pengaruh moderasi yang signifikan, terutama dalam pengambilan keputusan strategis (Müller & Dubois, 2021).

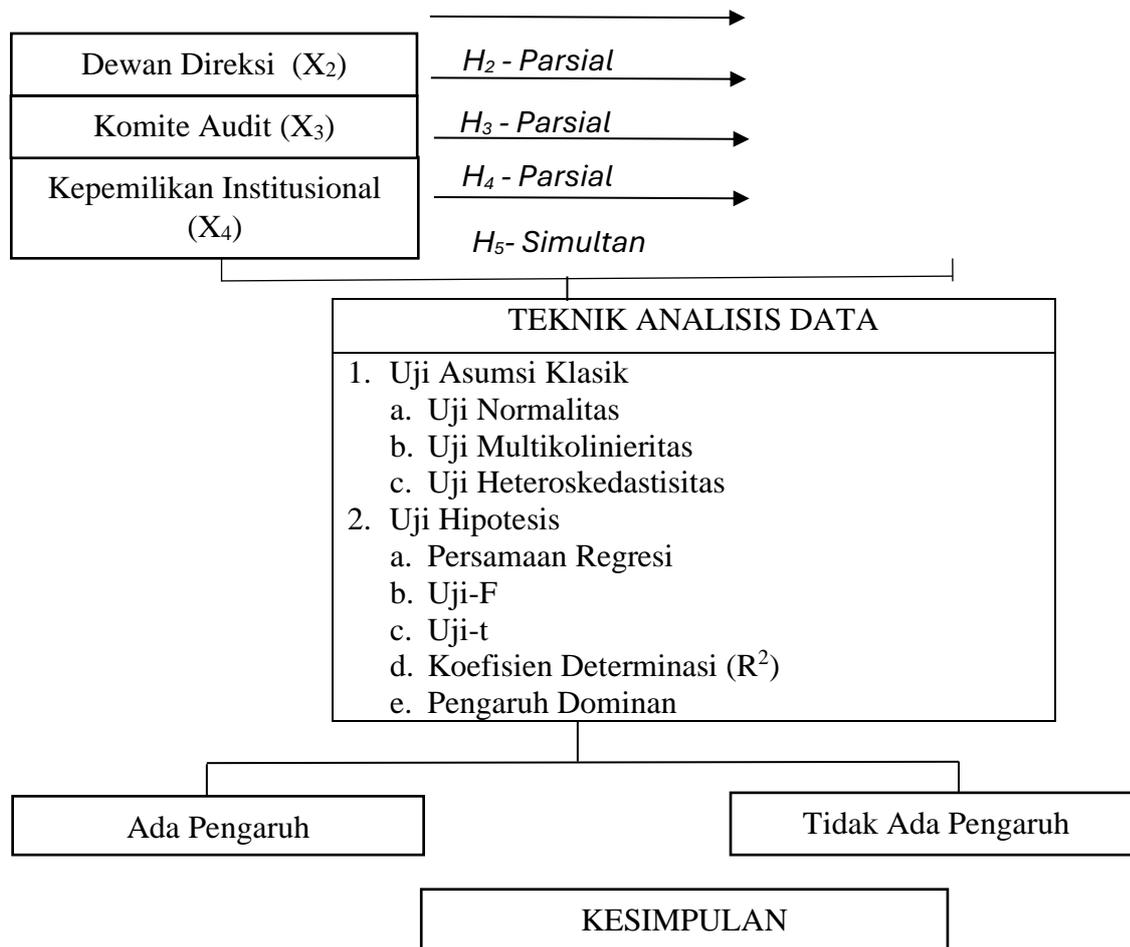
**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

Sumber : Data diolah, 2024

## 2.7 Kerangka Konseptual

Pada penelitian ini peneliti ingin menjelaskan pengaruh Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit dan Kepemilikan Institusional terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) Tahun 2019 – 2023. Variabel Independen yang digunakan yaitu Dewan Komisaris ( $X_1$ ), Dewan Direksi ( $X_2$ ), Komite Audit ( $X_3$ ) dan Kepemilikan Institusional ( $X_4$ ). Variabel Dependen yang digunakan yaitu Kinerja Keuangan ( $Y$ ). Di bawah ini adalah gambaran kerangka konseptual yang digunakan oleh peneliti.





**Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian**

Sumber : Penulis (2024)

## 2.8 Hipotesis

Hipotesis adalah Kesimpulan sementara dari suatu pernyataan di dalam sebuah penelitian yang memiliki tujuan untuk menunjukkan hubungan signifikan antara variabel independent dengan variabel dependen (Sugiyono, 2019:98). Hipotesis dilakukan untuk membantu kegiatan pengumpulan data yang diperlukan untuk menjawab masalah yang diteliti serta untuk menghubungkan realita dalam satu masalah. Sesuai dengan deskripsi teoritis serta kerangka pemikiran yang telah penulis sampaikan di atas, maka hipotesis penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

Hipotesis pertama menyatakan bahwa Dewan Komisaris berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan berakar pada peran penting Dewan Komisaris dalam pengawasan dan pengambilan keputusan strategis. Dewan Komisaris yang kompeten dan berintegritas memiliki kapasitas untuk mengarahkan perusahaan mencapai kinerja yang optimal melalui pengawasan ketat terhadap manajemen dan implementasi tata

kelola yang baik. Menurut penelitian oleh Amelia & Rizky (2021), dewan komisaris yang efektif mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sehingga mendukung peningkatan kinerja keuangan perusahaan. Studi ini konsisten dengan temuan lain yang menyatakan bahwa keterlibatan aktif dewan dalam mengawasi manajemen dapat mendorong efisiensi operasional dan menciptakan nilai bagi pemegang saham.

H1 : Dewan Komisaris berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan.

Hipotesis kedua menyatakan bahwa Dewan Direksi memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan. Dewan Direksi bertanggung jawab atas operasional harian perusahaan, termasuk dalam merumuskan strategi dan mengambil keputusan penting. Penelitian oleh Tran & Khadijah (2022) menunjukkan bahwa Dewan Direksi yang efektif, yang memiliki pengalaman dan pemahaman mendalam tentang industri, dapat secara langsung mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Sebaliknya, hipotesis yang menguji pengaruh Komite Audit tidak sepenuhnya signifikan dalam beberapa penelitian, seperti yang disoroti oleh Johnson & Parker (2023), yang menunjukkan bahwa peran komite audit tergantung pada sejauh mana independensi dan aktivitasnya dalam mengawasi pelaporan keuangan. Meskipun demikian, kepemilikan institusional yang signifikan juga ditemukan dapat mempengaruhi kinerja keuangan melalui peningkatan pengawasan terhadap kebijakan manajemen, sebagaimana ditemukan dalam penelitian oleh Müller & Dubois (2021).

H2 : Dewan Direksi berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan.

Hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan menekankan peran penting Komite Audit dalam mengawasi proses pelaporan keuangan dan memastikan transparansi serta akurasi laporan keuangan. Komite Audit yang independen dan aktif memainkan peran penting dalam memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan dan standar akuntansi yang berlaku, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan investor dan kinerja keuangan. Namun, beberapa penelitian, seperti yang dilakukan oleh Johnson & Parker (2023), menunjukkan bahwa pengaruh Komite Audit mungkin tidak selalu signifikan. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya independensi atau aktivitas yang efektif dari komite ini. Di sektor perbankan, transparansi keuangan sangat penting untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan nasabah, sehingga peran Komite Audit yang optimal dapat memberikan dampak yang lebih kuat pada peningkatan kinerja keuangan.

H3 : Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan.

Hipotesis keempat menyoroti pengaruh kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan. Kepemilikan institusional mengacu pada kepemilikan saham oleh lembaga-lembaga besar seperti dana pensiun, perusahaan asuransi, atau manajer investasi, yang umumnya memiliki kekuatan untuk memengaruhi keputusan manajerial. Penelitian oleh Putri Amelia & Muhammad Rizky (2021) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dapat meningkatkan tekanan pada manajemen untuk mencapai hasil keuangan yang lebih baik. Investor institusional cenderung lebih proaktif dalam mengawasi kinerja perusahaan dan dapat mendorong perusahaan untuk beroperasi lebih efisien dan transparan. Namun, penelitian lain seperti oleh Clara Müller & Pierre Dubois (2021) menemukan bahwa pengaruh kepemilikan institusional bisa bervariasi tergantung pada tujuan dan keterlibatan investor institusional dalam perusahaan.

H4 : Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan.

Hipotesis kelima menyatakan bahwa Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit, dan Kepemilikan Institusional secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan. Hipotesis ini menekankan pentingnya tata kelola perusahaan secara keseluruhan dalam mempengaruhi kinerja keuangan. Kombinasi dari peran pengawasan Dewan Komisaris, keputusan strategis Dewan Direksi, transparansi yang diawasi oleh Komite Audit, serta tekanan kepemilikan institusional secara kolektif berperan penting dalam memastikan perusahaan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Penelitian oleh Nguyen Tran & Siti Khadijah (2022) mendukung hipotesis ini dengan menunjukkan bahwa perusahaan dengan tata kelola yang kuat secara konsisten mencatatkan kinerja keuangan yang lebih baik. Penelitian ini menggarisbawahi bahwa keempat komponen tata kelola tersebut saling melengkapi dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perusahaan untuk mencapai pertumbuhan dan profitabilitas yang berkelanjutan.

H5 : Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit dan Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan Perusahaan Perbankan.